

## Bab 6

### PERLUASAN SIDI KE DAERAH BARU

#### Daftar penulis naskah untuk Bab 6

1. Iman Sumarno
2. Martini K.
3. Muhammad Enoch
4. Sunarno
5. Abas B Jahari

## Metodologi Perluasan SIDI

Dalam Bab II dikemukakan bahwa banyak faktor yang turut menentukan kejadian krisis pangan di suatu daerah. Penyebab krisis pangan dapat berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain. Karena itu usaha pemecahan masalah krisis pangan dapat pula berbeda. Bahkan untuk daerah yang sama kegiatan penanggulangan yang diperlukan dapat berbeda pada waktu yang berlainan. Begitu pula indikator yang digunakan untuk peramalan dan pengamatan situasi pangan dan gizi penduduk, waktu yang tepat untuk penggunaan masing-masing indikator dapat berbeda antar daerah, karena keadaan dan situasi daerah yang berbeda dalam banyak hal. Karena itu SIDI yang diterapkan di suatu daerah tidak dapat begitu saja dialihkan ke daerah lain tanpa ada penyesuaian terutama kalau situasi dan pola pertanian masyarakat berbeda.

Di lain pihak banyak pula terdapat persamaan-persamaan antara daerah yang satu dengan yang lain. Perbedaan utama yang mungkin terdapat ialah pada komponen indikator untuk peramalan dan pengamatan serta komponen tindakan penanganan masalah.

Dari pembicaraan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu SIDI untuk suatu daerah harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi daerah yang bersangkutan.

Buku pedoman perumusan SIDI yang dibicarakan dalam Bab III dimaksudkan agar pengelola SIDI di tingkat propinsi dapat merumuskan sendiri SIDI untuk kabupaten yang memerlukan di daerahnya. Pedoman perumusan SIDI tersebut memuat petunjuk tentang langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan serta metodologi yang digunakan untuk merumuskan SIDI. Selain itu pedoman tersebut memuat pula petunjuk umum untuk menyusun penuntun pelaksanaan sistem. Dimaksudkan dengan menggunakan buku pedoman perumusan SIDI, perluasan SIDI

SIDI dapat dilakukan dalam waktu relatif lebih cepat dan tim SKPG di propinsi-propinsi dapat melakukan perluasan SIDI ke daerah-daerah rawan yang memerlukannya.

Melalui buku pedoman perumusan SIDI tersebut dapat terlaksana pengalihan kemampuan pembangunan SIDI ke daerah-daerah, dan dengan demikian peranan teknis lembaga penelitian dan tingkat pusat semakin mengecil dalam perluasan SIDI. Di samping itu dengan pemahaman proses pengembangan sistem, pengelola SIDI di propinsi dapat pula melakukan penyesuaian atau perubahan yang diperlukan karena perubahan situasi seperti penyesuaian atau penambahan indikator dan lain-lain. Dalam pelaksanaan SIDI di berbagai daerah, akan selalu dihadapi masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang perlu diatasi agar sistem selalu berjalan lancar.

Di antara masalah-masalah tersebut ada yang pemecahannya memerlukan penelitian, khususnya penelitian operasional. Kalau SIDI sudah meluas ke banyak daerah, masalah-masalah yang dihadapi tidak mungkin lagi diatasi hanya oleh lembaga penelitian di tingkat pusat seperti yang dilakukan Puslitbang Gizi pada tahap-tahap awal pengembangan SIDI. Oleh karena itu untuk membantu tim SKPG propinsi dalam kegiatan penelitian operasional perlu dimanfaatkan potensi yang ada di daerah sendiri, yaitu perguruan tinggi setempat. Pemanfaatan potensi yang ada di perguruan tinggi setempat dilakukan seawal mungkin dengan melibatkan perguruan tinggi setempat dalam pengembangan SIDI di daerah, melalui kerjasama dengan tim SKPG tingkat propinsi. Agar perguruan tinggi setempat dapat menjalankan fungsinya sebagai pendukung pengembangan SIDI di daerah, kemampuan teknis yang berkaitan dengan SKPG perlu dikembangkan di perguruan tinggi yang bersangkutan. Pengalaman dan kemampuan yang ada di Puslitbang Gizi dalam pengembangan SKPG dan di IPB dalam penelitian operasional untuk menunjang pengembangan SIDI, perlu dialihkan melalui kerjasama penelitian dan latihan khusus. Dengan keikutsertaan perguruan tinggi setempat semenjak awal pengembangan SIDI di daerah, perguruan tinggi setempat dapat menjadi tulang punggung bagi tim pengelola SKPG di propinsi. Per

guruan tinggi setempat dapat menunjang dalam segi teknis dan penelitian operasional dalam pengembangan dan pemantapan SIDI dan pengembangan lebih lanjut menjadi SKPG yang lebih luas.

Telah dikemukakan dalam pembicaraan-pembicaraan terdahulu bahwa SIDI pada akhirnya merupakan bagian integral dari upaya peningkatan pangan dan gizi di daerah yang tidak terlepas dari upaya pembangunan daerah. Oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan SIDI menjadi bagian tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mencegah kejadian krisis pangan di daerah-daerah rawan di wilayahnya.

Namun untuk kelancaran pelaksanaan sistem di daerah-daerah peranan pengelola SKPG dan berbagai departemen dan instansi di tingkat nasional turut menentukan. Dukungan dari departemen-departemen dan instansi-instansi di tingkat pusat baik teknis maupun administratif sangat penting artinya bagi kelancaran pelaksanaan SIDI di daerah-daerah. Setelah penelitian dan pengembangan SIDI berupa proyek pemanduan berakhir, sementara ini tanggung jawab pengelolaan dan perluasan SIDI ke daerah-daerah baru dialihkan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan kepada Direktorat Gizi, yang ada Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan. Dalam melakukan tugas pengelolaan dan perluasan SIDI, Direktorat Gizi dalam segi teknis dan penelitian-penelitian yang diperlukan di tingkat pusat ditunjang oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi serta perguruan tinggi (IPB). Pengelolaan SIDI yang dalam tahun-tahun mendatang akan dikembangkan ke arah SKPG yang lengkap, memerlukan koordinasi yang lebih mantap di tingkat pusat.

### Strategi Perluasan SIDI ke Daerah Baru

Seperti dibicarakan dalam Bab terdahulu, SIDI di Lombok Tengah dimulai dengan kegiatan penelitian dan pengembangan. Setelah sistem untuk kabupaten Lombok Tengah dirumuskan dan dilakukan uji coba, sistem ini selanjutnya dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah. De-

ngan langkah-langkah yang sama SIDI dikembangkan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di kedua daerah, peranan tim SKPG Pusat Penelitian dan Pengembangan sangat besar pada tahap awal. Baru pada tahap pelaksanaan sistem, dimulai dengan peranan daerah sendiri. Namun tahun pertama pelaksanaan SIDI secara operasional, peranan tim SKPG dari Puslitbang Gizi masih cukup besar terutama dalam latihan-latihan tenaga pelaksana di berbagai tingkat sampai ke desa serta melakukan motivasi agar kegiatan berjalan lancar. Peranan tim SKPG Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi yang besar di dua daerah, disebabkan kedua daerah tersebut adalah daerah pengembangan pertama. Di lain pihak, proses ini berakibat peranan tingkat propinsi dalam segi teknis jadi berkurang. Menyadari hal ini, setelah pelaksanaan operasional SIDI di tingkat kabupaten sepenuhnya dilaksanakan, maka perlu upaya meningkatkan kemampuan teknis di tingkat propinsi. Peningkatan kemampuan diarahkan pada perumusan sistem, pemantapan organisasi dan sistem, dengan tujuan agar selanjutnya tim SKPG tingkat propinsi mampu mengelola dan melakukan perluasan SIDI ke daerah-daerah baru.

Berdasarkan pengalaman di kedua propinsi, pendekatan perluasan SIDI ke propinsi Bali dimulai dengan peranan tingkat propinsi semenjak awal. Langkah pertama ialah pembentukan tim SKPG oleh tingkat propinsi dengan surat keputusan Gubernur/KDH dalam BPGD yang sudah ada. Keikutsertaan perguruan tinggi setempat juga dimulai dari tahap awal, dengan mengikutkan wakil-wakil dari Universitas Udayanan dalam tim SKPG propinsi.

Peranan tim SKPG Puslitbang Gizi dalam tahap awal dalam pengembangan SKPG di Bali ialah mempersiapkan pedoman perumusan pengembangan SIDI dan kemudian memberikan penjelasan teknis pada tim SKPG propinsi tentang isi pedoman tersebut melalui diskusi-diskusi yang khusus diadakan untuk itu selama 3 hari. Kegiatan-kegiatan selanjutnya dilakukan oleh tim SKPG propinsi. Tim SKPG Puslitbang Gizi hanya memberikan bantuan atau masukan teknis selama kegiatan tim propinsi berjalan atas permintaan dari anggota tim propinsi. Bagi tim SKPG Puslitbang Gizi pendekatan pengembangan SIDI seperti dikemukakan di

atas mengadakan uji coba penggunaan pedoman perumusan SIDI untuk pengembangan SIDI di daerah baru. Oleh karena itu bersamaan dengan kegiatan-kegiatan tim SKPG propinsi Bali, tim SKPG Kabupaten Gizi melakukan kegiatan evaluasi berkaitan dengan penggunaan pedoman perumusan dan pengembangan SIDI tersebut dengan tujuan untuk menyempurnakannya. Pedoman ini berguna selanjutnya di daerah-daerah pengembangan yang lain di tahun-tahun mendatang. Dalam perluasan SIDI ke daerah-daerah baru, baik di dalam propinsi, maupun ke daerah propinsi baru, prioritas diberikan pada daerah-daerah rawan. Oleh karena itu perlu pedoman bagi kriteria daerah-daerah perluasan SIDI. Pada akhir tahun 1982 telah disusun oleh suatu tim lintas sektor suatu peta daerah rawan atas instruksi Presiden. Dalam peta tersebut diidentifikasi 12 propinsi yang digolongkan rawan karena di dalamnya terdapat seluruhnya sejumlah 71 kecamatan rawan berat, 117 kecamatan rawan ringan.

Sekalipun untuk keperluan perluasan SIDI, peta tersebut masih perlu penyempurnaan pemetaan yang sudah ada digunakan sebagai pedoman bagi penentuan daerah prioritas perluasan SIDI yang akan dilakukan secara bertahap dalam PELITA IV mendatang, agar benar-benar memberikan gambaran yang sesuai dengan tingkat kerawanan pangan dan gizi daerah yang bersangkutan. Dalam penyempurnaan ini perguruan tinggi setempat dapat berperan. Perluasan SIDI dalam wilayah propinsi ke kabupaten-kabupaten lain merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah propinsi yang bersangkutan. Oleh karena itu unit SKPG propinsi diharapkan dapat melakukan sebagian besar kegiatan perluasan ini. Unit SKPG yang ada di propinsi harus dapat menangani hal-hal berikut :

1. Menyusun rencana tentang kabupaten-kabupaten yang memerlukan SIDI, menyusun urutan prioritas dan penjadwalan waktu sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada.
2. Melakukan pendekatan-pendekatan ke tingkat kabupaten dalam upaya memotivasi dan mempersiapkan tingkat kabupaten untuk melaksanakan SIDI.

3. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk perumusan SIDI kabupaten dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya dengan perguruan tinggi setempat.
4. Melaksanakan latihan-latihan bagi pelaksana-pelaksana SIDI di tingkat kabupaten dan kecamatan agar sistem berjalan.
5. Melakukan kegiatan bimbingan dan memberikan bantuan teknis dalam kelancaran SIDI di kabupaten-kabupaten.
6. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan teknis yang diperlukan untuk membantu SIDI di kabupaten dengan Direktorat Gizi, Puslitbang Gizi, IPB, dan perguruan tinggi setempat.

Perluasan SIDI ke kabupaten baru sudah dimulai di propinsi-propinsi Nusa Tenggara Barat ke kabupaten Lombok Timur dan oleh pemerintah daerah propinsi sudah ditetapkan perluasan selanjutnya ke kabupaten Lombok Barat. Di propinsi Jawa Tengah, kabupaten kedua setelah Boyolali ialah kabupaten Pekalongan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai daerah perluasan.

Dalam berbagai pertemuan kerja di tingkat pusat telah disepakati bahwa perluasan SIDI ke propinsi baru hendaknya dilakukan secara bertahap. Namun pada akhir PELITA IV, SIDI sudah dapat dilaksanakan di 12 propinsi yang digolongkan sebagai daerah rawan menurut pemetaan daerah rawan disebutkan di atas.

Dalam tahun anggaran 1983/1984 perluasan SIDI ke propinsi baru akan mencakup Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur. Pengalaman selama mengembangkan SIDI di kabupaten Lombok Tengah dan Boyolali, menunjukkan bahwa pada tahap-tahap pertama pelaksanaan SIDI di kabupaten banyak masalah-masalah teknis dan operasional dihadapi oleh pelaksana-pelaksana SIDI di berbagai tingkat. Pada masa-masa ini peranan supervisi dari tingkat di atasnya sangat memegang peranan penting terhadap kelancaran pelaksanaan sistem. Bimbingan teknis secara langsung di tingkat kabupaten dan kecamatan dari tingkat propinsi akan sangat membantu pelaksanaan sistem, baik dalam pengolahan, analisis serta pelaporan data indikator, maupun yang menyangkut

kegiatan pemanfaatan informasi untuk intervensi.

Demikian pula pada tahap-tahap persiapan untuk formulasi sistem di tingkat propinsi dan pengorganisasian SIDI di daerah kabupaten baru, bantuan teknis dari pengelola SIDI di tingkat nasional sangat penting. Bimbingan teknis pada awal pengembangan SIDI di propinsi baru diperlukan lebih banyak dan teratur. Peranan Direktorat Gizi sebagai unit pengelola SIDI di tingkat pusat sangat penting dalam mengkoordinasikan kegiatan bimbingan yang diperlukan berbagai departemen yang bersangkutan.

Dalam perluasan SIDI ke daerah baru, masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya perlu diatasi secepat mungkin. Peranan penelitian operasional untuk menjaga kelancaran sistem dan kelestariannya akan sangat penting. Namun perlu diidentifikasi oleh tim pelaksana SIDI, masalah-masalah mana yang memerlukan penelitian dan mana yang tidak. Jika ternyata penelitian operasional diperlukan, adalah tugas tim pengelola SIDI di tingkat propinsi untuk mengusahakan agar penelitian yang diperlukan dapat terlaksana baik melalui bantuan perguruan tinggi setempat atau dari tingkat pusat jika diperlukan.